



**WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 34 TAHUN 2019**

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
BAGI WARGA MISKIN KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka perlindungan jaminan sosial, memberikan hak tempat hunian yang layak memenuhi persyaratan standar minimal rumah sehat bagi warga miskin yang sudah memiliki tempat hunian sah menurut status kepemilikan lahan dan bangunan;
- b. Bahwa sebagian rumah warga miskin tersebut maka perlu dilakukan rehabilitasi rumah mereka;
- c. bahwa perlu diatur tentang pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) bagi warga miskin Kota Banjarmasin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Pemberian Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Bagi Warga Miskin Kota Banjarmasin.

Mengingat

- 1. **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;**
- 2. **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);**
- 3. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia**

- Nomor 5188);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206 ;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
 9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/ PRT/M/2016 tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
 11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak ayak Huni (RS RTLH) dan Sarana Lingkungan (Sarling)
 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya RS-RTLH bagi warga miskin Kota Banjarmasin adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Banjarmasin untuk membantu meringankan beban biaya bagi warga masyarakat miskin dalam membangun atau merehabilitasi tempat hunian yang layak sesuai standard minimal dan persyaratan rumah sehat.
- (2) Tujuan diberikannya pelayanan RS-RTLH adalah meningkatnya taraf hidup kesejahteraan warga miskin melalui kondisi sehat, aman, dan nyaman beraktifitas dalam rumah dan lingkungannya, sehingga terlaksana peran dan fungsi idividu, keluarga, kelompok dan masyarakat sesuai kodratnya.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA

Bagian Pertama

Persyaratan

Pasal 3

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh bantuan sosial RS-RTLH sebagai berikut :

- a. KTP WNI Kota Banjarmasin pemohon yang masih berlaku dan difotocopy 2 (dua) lembar serta dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin dengan ketentuan :
 1. Apabila KTP WNI yang bersangkutan hilang, harus dilengkapi persyaratan membawa bukti laporan kehilangan dan pihak kepolisian tempat kehilangan;
 2. Apabila yang bersangkutan tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, maka harus dibuatkan Surat Keterangan tempat tinggal atau domisili dan Kelurahan setempat.
- b. foto copy Kartu Keluarga pemohon yang dilegalisir oleh Disdukcapil ;
- c. mengisi blanko permohonan bantuan RS-RTLH;
- d. menyerahkan photokopi surat keterangan kepemilikan tanah yang dilegalisir.

Bagian Kedua

Tata cara

Pasal 4

Tata cara mendapatkan pelayanan bantuan sosial RS-RTLH bagi warga miskin haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Kriteria Lokasi Kegiatan :

Lokasi kegiatan penataan sosial lingkungan melalui RS-RTLH disepadankan dengan Sarling yang diprioritaskan pada :

1. wilayah yang berstatus kelurahan ;
2. tingkat kemiskinan yang tinggi ;
3. masuk kategori kumuh dengan dukungan prasarana lingkungan yang minim; dan
4. rumah Tidak layak Huni terkonsentrasi dalam satu wilayah.

b. Kriteria Kepala Keluarga Penerima bantuan RS-RTLH adalah sebagai berikut :

1. memiliki KTP/identitas diri yang berlaku ;
2. kepala keluarga^a/ anggota keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan (memperoleh upah dibawah UMR) ;
3. kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk penduduk miskin seperti zakat dan Raskin/BPNT ;
4. tidak memiliki aset lain apabila dijual tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup anggota keluarga selama 3 (tiga) bulan kecuali tanah dan rumah yang ditempati ;
5. memiliki rumah diatas tanah miliki sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau girik atau ada surat keterangan kepemilikan dari kelurahan atas status tanah ;
6. bersedia tidak menjual atau menyewakan rumah tersebut selama minimal 5 (lima) tahun setelah mendapatkan bantuan RS RTLH dari Kementerian Sosial ;
7. Rumah yang dimiliki dan ditempati adalah rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat kesehatan, kearnanan dan sosial, dengan kondisi sebagai berikut
 - a. tidak permanen dan /atau rusak ;
 - b. luas bangunan kurang dari 7M2 dengan jumlah anggota keluarga terdiri dari 3 orang (keluarga inti)
 - c. dinding dan atap dibuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk seperti papan, ilalang, bambu yang dianyam gedeg dan sebagainya ;
 - d. dinding dan atap sudah rusak sehingga membahayakan, mengganggu keselamatan penghuninya ;
 - e. lantai tanah/ semen dalam kondisi rusak ;
 - f. diutamakan rumah tidak memiliki fasilitas mandi, cuci dan kakus.

BAB IV BENTUK LAYANAN DAN BESARAN BIAYA

Pasal 5

1. Bentuk layanan yang diberikan adalah bantuan sosial RS-RTLH diperuntukan kepada warga miskin Kota Banjarmasin yang terdaftar di BDT Kota Banjarmasin ;
2. Jumlah besaran biaya untuk pelaksanaan RS-RTLH dengan nilai Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan upah tukang dianggarkan di APBD Dinas Sosial Kota Banjarmasin.
3. Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bisa menyesuaikan kondisi dengan berpedoman dan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

Semua pembiayaan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota Banjarmasin ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Mei 2019

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada Tanggal 17 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H.HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR 34